

Menerima Siswa Baru  
Tahun Ajaran 2021 / 2022

**LIVE** OFFLINE/ONLINE  
STREAMING - INTERAKTIF

SIAP KBM TATAP MUKA  
STANDAR PROTOKOL KESEHATAN  
SEMUA PENGAJAR DAN KARYAWAN  
SUDAH DIVAKSIN

## SIAP LEBIH DINI

# NAIK KELAS MASUK

## NEUTRON YOGYAKARTA

"Pendampingan Belajar Terbaik Di Era Pandemi"

**BIMBINGAN MULAI : 04, 10, 16, 26 JULI 2021**



BIMBINGAN BELAJAR  
4-6 SD, 1-3 SMP, 1-3 SMA, ALUMNI  
**NEUTRON**  
YOGYAKARTA  
Langkah Pasti Meraih Prestasi

[www:neutron.co.id](http://www.neutron.co.id)

### 3M, 3T DAN VAKSINASI DIPERKUAT

## Tak Bergejala, Tak Perlu Dirawat di RS

**JAKARTA (KR)** - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, sejalan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali, Pemerintah juga terus memperkuat upaya penanganan pandemi.

"Yang pertama adalah perubahan perilaku atau terkenal dengan 3M, yang kedua deteksi atau 3T, dan yang ketiga vaksinasi. Itu tiga strategi mengatasi pandemi untuk orang yang sehat. Sedangkan untuk yang sudah sakit, ada strategi perawatan atau terapeutik," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/7).

Menkes menegaskan, Pemerintah menjalankan strategi ini secara bersamaan sesuai panduan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. "Jadi tidak ada satu yang lebih penting

dibandingkan yang lain," imbuhnya.

Untuk deteksi, Menkes meminta jajarannya di daerah meningkatkan pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) hingga 3-4 kali lipat dari yang dilakukan saat ini. Untuk mencapai target tersebut, setiap kabupaten/kota telah ditetapkan target harian yang harus dikejar sesuai guidance WHO. "Kita bisa berharap mungkin dari sekitar 100.000-an sekarang, kita bisa naikan menjadi 400.000-500.000 testing perhari. Jadi banyak dae-

rah dan klaster yang sudah tinggi positivity ratelynya kita harus naikan sampai 15 kali lipat atau 15 tes per 1.000 populasi perminggu," paparnya.

Prioritas pengetesan juga diperbaiki, untuk pengetesan epidemiologis bukan untuk penapisan atau syarat perjalanan. "Jadi benar-benar kita kejar suspect dan kontak eratnya, bukan yang skrining dia mau masuk ke mana, mau jalan ke mana, tapi benar-benar khusus untuk testing epidemiologi," tegasnya.

Untuk pelacakan atau tracing, ujar Menkes, juga diperketat. Seluruh kontak erat dari kasus terkonfirmasi positif harus dikarantina sampai hasil tes menyatakan negatif agar tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Pemda boleh menggunakan pemeriksaan swab PCR maupun RDT antigen. RDT antigen diutamakan bagi daerah yang alat diagnosis terbatas, sehingga hasilnya bisa diketahui lebih cepat dan tes dapat dilakukan secara masif sehingga dapat mempercepat tracing. "Target kita hasil testing harus keluar dalam waktu 24 jam, kalau PCR tidak bisa kelu-

ar 24 jam kita pakai rapid antigen," ujarnya.

Menkes mengatakan, pasien yang dirawat di rumah sakit dipastikan hanya yang memiliki gejala sedang sampai berat. Hal ini bertujuan agar pasien yang tidak bergejala tidak akan terkepos oleh virus di rumah sakit. "Jadi masyarakat tidak usah panik, kalau tidak ada sesak napas, kalau saturasi oksigennya masih di atas 95 persen, kalau tidak ada komorbid, lebih baik dirawat di rumah kalau dia positif, atau dirawat di isolasi terpusat," ujar Menkes.

Untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyiapkan sejumlah skema penambahan sumber daya manusia (SDM). Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI Adib Khumaidi menyebutkan, skema pertama, dokter umum yang sudah menyelesaikan internship bisa disiapkan membantu di pelayanan fasilitas kesehatan. Berikutnya, mahasiswa kedokteran yang sudah lulus dan mendapatkan sertifikasi uji kompetensi profesi dokter sudah bisa menjalankan pekerjaan. (Sim/San)-d



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

**DITUTUP UNTUK PEDAGANG: Warga berolahraga di Alun-alun Selatan atau Alun-alun Kidul (Alkid), Kraton Yogyakarta, Jumat (2/7). Satgas Covid-19 Kemantren Kraton menutup kawasan Alkid untuk pelaku usaha dan pedagang pada 1-14 Juli 2021 guna menekan penyebaran Covid-19.**

### SEPEKAN 39 KALI AWAN PANAS

## Gempa Eksternal Merapi Meningkat

**YOGYA (KR)** - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran sebanyak 39 kali periode 25 Juni-1 Juli 2021. Yakni 10 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimal 2.000 meter dan 29 kali ke tenggara dengan jarak luncur maksimal 3.000 meter.

Untuk guguran lava teramatinya sebanyak 100 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimal 2.000 meter dan 26 kali ke arah tenggara berjarak luncur maksimal 1.200 meter. Terjadi hujan abu di beberapa wilayah di sektor tenggara Gunung Merapi pada 25 Juni 2021.

Sedangkan data kegempaan dalam periode tersebut (minggu ini) tercatat 21 kali gempa Vulkanik Dangkal (VTB), 141 kali gempa Fase Banyak (MP), 1.824 kali gempa Guguran (RF), 143 kali gempa Hembusan (DG) dan 4 kali gempa Tektonik (TT). Pada 28 Juni 2021 pukul 05.15 WIB terjadi gempa tektonik yang terasa di se-

mua pos pengamatan Gunung Merapi. "Kegempaan eksternal (AP, RF, dan DG) pada minggu ini lebih tinggi dibandingkan minggu lalu," terang Kepala BPPTKG Hanik Humaida dalam siaran pers, Jumat (2/7).

Menurut Hanik, volume kubah lava di sektor barat daya sebesar 1.680.000 m<sup>3</sup> dengan laju pertumbuhan 11.800 m<sup>3</sup>/hari. Analisis morfologi area puncak berdasarkan foto dari sektor tenggara tanggal 1 Juli menunjukkan adanya perubahan tinggi kubah tengah sebesar 0,5 meter lebih rendah dari tanggal 24 Juni 2021. "Meningkatnya jumlah kejadian awan panas guguran dan guguran lava menyebabkan kubah tengah teramatinya lebih rendah dari minggu sebelumnya," katanya.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental maka disimpulkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif. Status aktivitas masih dalam tingkat 'Siaga'. (Dev)-d

## APBN Tetap Siaga Pandemi

**JAKARTA (KR)** - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah kembali menginjak rem darurat, APBN tetap siaga sebagai instrumen yang responsif dan fleksibel untuk merespons perkembangan kasus harian Covid-19 yang meningkat di akhir Juni 2021.

"APBN tetap fleksibel dan memberikan dukungan penuh, isi targetnya," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers daring Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat, di Jakarta, Jumat (2/7).

Dikatakan, untuk mendukung PPKM Darurat, kesiapsiagaan APBN sebagai instrumen kebijakan yang responsif dan fleksibel sangat dibutuhkan untuk penguatan sektor kesehatan dan program, antara lain.

Menurutnya pemerintah akan menambah anggaran Kesehatan sekitar Rp 13,01 triliun. Dari semula Rp 172,84 tri-

lun menjadi Rp 185,85 triliun. Ini untuk mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien, insentif nakes, dan vaksinasi, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah.

Kemudian mempercepat pencairan PKH triwulan III pada awal Juli 2021, bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat/KPM dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 7,1 triliun.

Pemenuhan target awal 18,8 juta KPM dan percepatan pencairan Kartu Sembako pada awal Juli 2021, dengan indeks bantuan Rp 200 ribu per bulan.

Kemudian Perpanjangan Bansos Tunai (BST) selama 2 bulan, yaitu Juli - Agustus 2021, yang disalurkan 1 (satu) kali pada bulan Juli, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 6,1 triliun diberikan kepada 10 juta KPM non-Program Sembako dan Non PKH, dengan indeks bantuan Rp 300 ribu per bulan. (Lmg)-f

### PELAKU PERJALANAN

## Wajib Sudah Vaksin Covid-19

**JAKARTA (KR)** - Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh seperti pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama.

Demikian ketentuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai berlaku Sabtu (3/7) hari ini. Berlakunya ketentuan perjalanan tersebut sebagai upaya menekan laju kenaikan positif Covid-19.

Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Beleid yang ditekankan pada, Jumat (2/7), merupakan tindak lanjut arahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait PPKM Darurat yang akan diberlakukan mulai 3 Juli 2021.

Melalui Inmendagri Nomor 15/2021, Tito memberi instruksi khusus kepada para gubernur dan bupati/wali kota di wilayah dengan kriteria level 4 dan level 3, dari DKI Jakarta hingga Bali. Untuk pelaksanaan kegiatan pelaku perjalanan domestik ada beberapa ketentuan selama PPKM Darurat berlangsung.

Secara spesifik, ketentuan tersebut menyebutkan, untuk pelaku perjalanan menggunakan pesawat udara harus menunjukkan PCR paling lambat 2x24 jam, sementara Antigen paling lambat 1x24 jam untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke

Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek," tulis beleid tersebut seperti yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (2/7).

Kemudian untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

Untuk mengurangi laju penularan pemerintah pun menerapkan PPKM Darurat yang mulai berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Presiden Joko Widodo menegaskan keputusan ini diambil setelah mendapatkan masukan dari para menteri maupun ahli kesehatan terkait perkembangan Covid-19.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," tegas Jokowi, Kamis (1/7). (Jon)-f

#### Upaya Penanganan Pandemi

- Untuk orang yang sehat:** Perkuat 3M, 3T, dan vaksinasi.
- Untuk yang sudah sakit:** Tingkatkan perawatan atau terapeutik. Perawatan di RS hanya untuk pasien bergejala sedang dan berat serta memiliki komorbid.



Sumber: Menkes Budi Gunadi Sadikin

Grafs: Arko

### DAERAH MASUK ZONA PPKM DARURAT

## Menag Larang Salat Idul Adha

**JAKARTA (KR)** - Pemerintah melarang salat Idul Adha 1442 H pada 20 Juli mendatang, baik di masjid maupun di tanah lapangan, terutama di wilayah yang masuk zona PPKM Darurat. "Peribadatan di tempat ibadah untuk sementara ditiadakan selama masa PPKM Darurat," ujar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7).

Keputusan itu diambil usai digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Oleh karena itu Menag meminta masyarakat untuk melakukan takbiran pada Idul Adha mendatang di rumah saja.

"Takbiran dilarang di zona PPKM Darurat, dilarang ada takbir keliling dan arak-arakan di jalan, di masjid juga dilarang, takbiran di rumah masing-masing," kata Menag.

Larangan salat Idul Adha dan takbir keliling dilakukan sehubungan dengan adanya kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang berlaku 3-20 Juli. Adapun, untuk pelaksanaan

penyembelihan hewan kurban, Kemenag akan mengatur detail pelaksanaannya agar dilakukan di tempat yang terbuka dan dibatasi.

Sebelumnya, Kemenag telah menerbitkan Surat Edaran No 15/2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Salat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1442/2021 M. SE ini antara lain mengatur larangan kegiatan takbir keliling. Selain itu, salat Idul Adha di lapangan terbuka atau di masjid atau musala pada daerah zona merah dan oranye.

Sementara itu, pada daerah di luar zona merah dan oranye, salat Idul Adha dapat dilaksanakan di lapangan terbuka atau masjid serta musala berdasarkan penetapan dari pemerintah daerah atau Satgas Covid-19 di daerah dengan protokol kesehatan ketat.

Sejalan dengan ketentuan Kemenag, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengingatkan warga tidak mengadakan takbir keliling untuk menyambut Idul Adha dan disarankan, takbir sebaiknya dilaku-

kan di rumah.

Selain itu, Muhammadiyah juga menyatakan Salat Idul Adha di lapangan/ masjid/tempat fasilitas umum sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Bagi yang menghendaki, Salat Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga.

Muhammadiyah mengeluarkan SE PP No 05/EDR/1.0/E/2021 tanggal 14 Zulkaedah 1442 bertepatan 2 Juli 2021 yang ditandatangani Ketua Umum Prof Dr Haedar Nashir dan Sekretaris Dr Agung Danarto, Jumat (2/7). SE disampaikan terkait dengan peningkatan angka kasus pandemi untuk menjadi tuntunan Salat Idul Adha dan Kurban pada masa darurat pandemi Covid-19.

"Hukum asal pelaksanaan salat Idul Adha adalah sunah muakkadah, dan dilaksanakan di lapangan. Karena kondisi persebaran Covid-19 saat ini sangat tinggi dan cepat serta sangat membahayakan, maka pelaksanaan salat Idul Adha tahun 1442 H seyogyanya dilaksanakan di rumah masing-masing," jelas Haedar. (Ati/Fsy)-d



KR-Antara/Ari Bowo Sucipto

**DEKORASI RAMAH LINGKUNGAN: Pedagang menata dekorasi rumah berupa bunga kering dan kerajinan berbahan ramah lingkungan yang didatangkan dari Yogyakarta di Galeri Azzura, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Jumat (2/7). Permintaan dekorasi rumah tersebut meningkat dari 10 menjadi 20 transaksi sehari seiring makin banyaknya masyarakat menerangkan tren gaya hidup ramah lingkungan.**